



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Siaran Pers Nomor : 04/HumasPMK/I/2017

Menko PMK Dorong BPJS Kesehatan Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Palembang (25/01) - Mengutip arahan Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor pada tanggal 4 Januari 2017 menegaskan bahwa fokus program Pemerintah ditahun 2017 adalah pemerataan kesejahteraan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan, salah satu prioritas untuk pemerataan kesejahteraan adalah dengan perluasan akses Kartu Indonesia Sehat (KIS) agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan lebih baik. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan memiliki peran sangat penting untuk mewujudkannya.

Demikian disampaikan Menko PMK hari ini (25/01) saat menjadi pembicara utama dalam acara Rapat Arahan Strategis Nasional BPJS Kesehatan Tahun 2017 yang mengusung tema “Meningkatkan Kestinambungan Program JKN-KIS Menuju Cakupan Semesta melalui Keberlangsungan Finansial dan Kepuasan Peserta”.

Salah satu target prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah terwujudnya *Universal Health Coverage* (UHC) pada tahun 2019, yaitu 254 juta jiwa atau 95% penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan. Saat ini cakupan peserta BPJS Kesehatan mencapai 171,86 juta jiwa (per 23 Desember 2016), sementara target 2016 sebesar 188,2 juta jiwa.

“Perlu diambil langkah terobosan dalam peningkatan cakupan kepesertaan menuju *universal health coverage* pada tahun 2019 sehingga bisa mencapai 254 juta jiwa atau 95%. Pertemuan seperti ini bernilai strategis guna mensinergikan upaya kita bersama untuk mencapai target UHC serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan”, ujar Menko PMK.

Menko PMK menambahkan bahwa tahun 2017 adalah periode yang sangat strategis untuk menjaga kestinambungan program, sekaligus melakukan percepatan cakupan peserta, baik peserta Pekerja Penerima Upah maupun Pekerja Bukan Penerima Upah. Untuk itu, BPJS Kesehatan perlu meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya yang fokus pada hal : 1) Mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 2) Perbaikan sistem rujukan berjenjang dan peningkatan kualitas layanan kesehatan; 3) Kerjasama penyediaan fasilitas kesehatan dengan RS Swasta; 4) Meningkatkan kepesertaan potensial BPJS Kesehatan dan perbaikan tingkat kolektibilitas premi dari peserta; 5) Peningkatan kerjasama dengan Pemda; serta 6) Sosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

"Dalam upaya untuk membangun kapabilitas keuangan BPJS Kesehatan harus memiliki kemampuan berkesinambungan dalam membiayai manfaat dan operasional JKN, perlu perhitungan cermat terhadap faktor yang mempengaruhi kondisi *mismatch* penerimaan dan pengeluaran BPJS Kesehatan", pesan Menko PMK.

Perhitungan yang cermat tersebut mencakup hal-hal seperti cakupan kepesertaan yang optimal, efektivitas manfaat yang memberi kepuasan peserta, pencegahan *error, fraud and corruption* (EFC), tingkat kolektivitas iuran, tingkat morbiditas (angka kesakitan), optimalisasi COB (*coordination of benefit*), tarif iuran, dan lain sebagainya.

BPJS Kesehatan juga telah mencanangkan praktek Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di lingkungannya. Misal : perbaikan sistem pelayanan dari 7 menit menjadi 3 menit, pengintegrasian NIK dengan kepesertaan JKN, pendaftaran dan pembayaran iuran online, perluasan kanal-kanal pembayaran iuran, dan layanan customer service 24 jam.

Pada penutupnya, Menko PMK berharap agar pertemuan ini bukan hanya seremonial semata namun menghasilkan terobosan-terobosan dalam rangka pelayanan prima BPJS Kesehatan kepada masyarakat.

Mengakhiri kunjungan kerjanya ke Palembang, Menko PMK sekaligus melakukan peninjauan Puskesmas Kampus Palembang. Menko PMK menyaksikan langsung proses pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (KJS) maupun peserta kartu Indonesia Sehat (KIS). Apakah pelayanan yang disampaikan kepada masyarakat sesuai

dengan nilai-nilai Gerakan Nasional Revolusi Mental sehingga memudahkan masyarakat yang mengakses layanan kesehatan. Selanjutnya, Menko PMK meninjau ruang-ruang pelayanan seperti MTBS, Poli Umum, KIA/KB Ruang IVA maupun ruang tindakan. Disela-sela kunjungan, Menko PMK mengajak dialog warga yang sedang berkunjung ke puskesmas sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan.

Sebelum menuju airport untuk kembali ke Jakarta, Menko PMK menyempatkan meninjau wisma atlet Jaka Baring terkait persiapan Asian Games 2018. Dalam kesempatan itu Menko PMK mengecek kamar tidur atlet, ruang pengecakan kesehatan atlet dan lain-lain.

Turut mendampingi kunjungan kerja Menko PMK di Palembang antara lain : Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Alex Noerdin, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Giri Ramanda Kiemas, Anggota DPRRI Erwin Singajuru, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dan Wakapolda Provinsi Sumatera Selatan Brigjen. Pol. Asep Suhendar.

*Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter @kemenkopmk*